

# SKRIPSI

## STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP ANAK MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN AUSTRALIA NEW SOUTH WALES

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar*

*Sarjana Hukum*



Oleh :

**SARTIKA RAHMAH YANI**

**1510111014**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)**

**Pembimbing :**

**Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H**

**Riki Afrizal, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

# STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP ANAK MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN AUSTRALIA NEW SOUTH WALES

Sartika Rahmah Yani, 121 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

## ABSTRAK

Canggihnya perkembangan teknologi komputer khususnya yang berbasis telekomunikasi, maka dikenal pula satu hal baru yang terpopuler dengan sebutan *internet*. Internet diartikan sebagai jaringan-jaringannya telah berkembang di seluruh dunia dan menjadi suatu fenomena yang dengan tantangan baru tersendiri. *Cybercrime* merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan, dengan menggunakan sarana-sarana dari, dalam, atau terhadap sistem/jaringan komputer. Dalam “memori penjelasan” (*Explanatory Memorandum*) dikemukakan khusus mengenai “*child pornography*” dengan menggunakan sistem komputer dijelaskan bahwa delik atau tindak pidana ini merupakan salah satu modus operandi yang sangat berbahaya pada saat ini. Mengingat Indonesia dan negara Australia telah menandatangani dan mengesahkan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak. Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan yang menjadi permasalahan adalah 1) bagaimana perbandingan pengaturan Perundang-undangan mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak melalui internet yang berlaku di Indonesia dan Australia (New South Wales) 2) bagaimana perbandingan pemberian sanksi pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan tindak pidana pornografi terhadap anak melalui internet di Indonesia dan Australia (New South Wales). Dalam penulisan ini, metode penelitian adalah hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dan setiap persetujuan yang nyata oleh seorang anak tidak dianggap sah. Sehingga, tindak pidana pornografi terhadap anak di *internet* sangat berbahaya, merupakan asas universal menurut perjanjian dan hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana, dengan melihat hukum pidana berlaku secara umum melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia) yaitu melindungi kepentingan dunia. pembuktian kesalahan dan mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana pornografi anak apalagi dengan perkembangan *internet* semakin modern bukan hal yang mudah, perkembangan pertanggungjawaban pidana perbuatan tersebut dapat dipertimbangkan pengecualian peniadaan pidana dan konsep *strict liability*.

Kata Kunci : Perbandingan, *Cybercrime*, Pornografi Anak, Internet, Tindak Pidana, Sanksi

# **STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP ANAK MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN AUSTRALIA (NEW SOUTH WALES)**

Sartika Rahmah Yani, 121 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

## **ABSTRACT**

*The advanced of computer technology development, especially based on telecommunications, is also known as one of the most popular new things called the internet. The Internet is defined as its networks have expanded all over the world and become a phenomenon which has its own new challenges. Cybercrime is a crime or violation committed by using means from, within, or against a computer system/network. In the "explanatory memorandum" it is specifically stated about "child pornography" using a computer system, it is explained that this criminal offense is one of the most dangerous modus operandi at current time. Indonesia and Australia have adopted and ratified the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child Concerning the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Based on the background of the problem, it is formulated that the problem is 1) how is the comparison of the legislation regarding the criminal offence of pornography against children via the internet that applies in Indonesia and Australia (New South Wales), 2) how is the comparison of giving penalty for criminals that can be criminally charged to criminal acts of pornography against children via the internet in Indonesia and Australia (New South Wales). In this study, the research method is normative law. The nature of this research is prescriptive, application of statutory regulations and comparative law. Based on the results of research and discussion, it is concluded that a child cannot give consent and any real consent by a child is not considered valid. Thus, the criminal act of pornography against children on the internet is very dangerous, is a universal principle according to international treaties and laws that have been formulated as criminal acts, by placing criminal law in general, beyond the boundaries of the territory and space of people (Indonesia), namely protecting the interests of the world. Proving wrongdoing and accountability for the makers of child pornography crimes especially with the development of the internet is increasingly advanced is not an easy and very complex thing, the development of criminal liability of such acts can consider the exception of criminal elimination or defense and the concept of strict liability.*

*Keyword : Comparative, Cybercrime, Child Pornography, Internet, Criminal Offences, Penalty*